

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.1.692003/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL
- Sebesar : Rp. 1.715.038.031.000 (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA BELAS MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.715.038.031.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 1.715.038.031.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

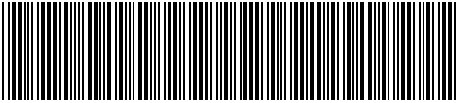
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026

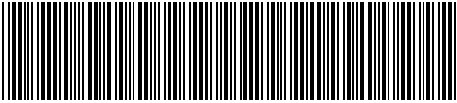


DS:7509-0771-7876-8611

Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.715.038.031.000
WA.7092	Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama	Rp.	9.592.640.000
WA.7093	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum	Rp.	22.672.307.000
WA.7094	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum	Rp.	5.119.557.000
WA.7095	Perencanaan dan Organisasi	Rp.	12.340.526.000
WA.7096	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum	Rp.	5.106.437.000
WA.7097	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum	Rp.	1.660.206.564.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
I A. INFORMASI KINERJA



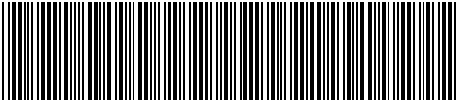
DS:7509-0771-7876-8611

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			1.715.038.031.000
Kegiatan	:	7092	Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama			9.592.640.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Citra Positif Kementerian Hukum			
		2. 01	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Hukum			
		3. 01	Nilai Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7092.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,00	Layanan, Perkara	9.592.640.000
Rincian Output	:	01	EBA.001 Pembinaan dan Pelaksanaan Hukum, Komunikasi Publik , dan Kerja Sama	1.00	Layanan	1.281.568.000
		02	EBA.002 Kerja Sama	1.00	Layanan	1.838.126.000
		03	EBA.003 Layanan Komunikasi Publik Bidang Hukum	1.00	Layanan	5.917.956.000
		04	EBA.Z01 Layanan Hukum	1.00	Layanan	192.658.000
		05	EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	54.990.000
		06	EBA.Z04 Layanan Bantuan Hukum Pegawai	4.00	Perkara	92.318.000
		07	EBA.Z05 Layanan Bantuan Hukum Institusi	4.00	Perkara	215.024.000
Kegiatan	:	7093	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum			22.672.307.000
	:	1. 01	Indeks BerAKHLAK Kementerian Hukum			
		2. 02	Indeks Sistem Merit Kementerian Hukum			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7093.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	7.328,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	22.672.307.000
Rincian Output	:	01	EBC.001 Layanan Seleksi Penerimaan CASN Kementerian Hukum	1.00	Layanan	5.000.000.000
		02	EBC.Z12 Layanan Manajemen SDM	7327.00	Orang	17.672.307.000
Kegiatan	:	7094	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum			5.119.557.000
	:	1. 01	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum			
		2. 02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
I A. INFORMASI KINERJA

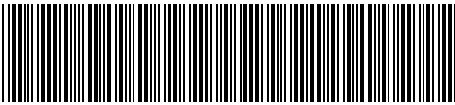


DS:7509-0771-7876-8611

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum						
3. 03 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK						
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7094.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,00	Layanan, Rekomendasi 5.119.557.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Layanan Manajemen Keuangan tingkat Kementerian	1.00	Layanan 4.757.727.000
			02 EBD.Z26	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan 361.830.000
Kegiatan	:	7095	Perencanaan dan Organisasi			12.340.526.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Pelayanan Publik			
		2. 01	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum			
		3. 01	Nilai SAKIP Kementerian Hukum			
		4. 01	Persentase Rekomendasi LHE RB Yang Ditindaklanjuti			
		5. 02	Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Hukum			
		6. 02	Nilai Indeks Kapabilitas Kelembagaan			
		7. 02	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB			
		8. 03	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan Publik Kementerian Hukum			
		9. 04	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7095.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Perkara 5.007.221.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Pembinaan dan Koordinasi Biro Perencanaan dan Organisasi dan Layanan Publik	1.00	Layanan 4.297.321.000
			02 EBA.Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan 709.900.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7095.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Layanan, Rekomendasi 7.333.305.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian	1.00	Layanan 3.283.980.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
I A. INFORMASI KINERJA

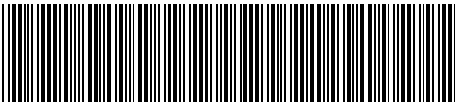


DS:7509-0771-7876-8611

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

Layanan Manajemen Kinerja Internal				Layanan, Rekomendasi		
	02	EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Unit Sekretariat Jenderal	1.00	Layanan	2.626.925.000
	03	EBD.Z23	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Layanan	810.000.000
	04	EBD.Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Rekomendasi	204.000.000
	05	EBD.Z31	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	197.400.000
	06	EBD.Z35	Layanan Manajemen Kinerja	1.00	Layanan	211.000.000
Kegiatan	:	7096	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum			5.106.437.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Pengelolaan Aset			
	:	2. 02	Indeks Tata Kelola Pengadaan			
Klasifikasi Rincian Output 6	:	7096.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Perkara	5.106.437.000
Rincian Output	:	01 EBA.001	Layanan BMN tingkat Kementerian	1.00	Layanan	4.626.437.000
	:	02 EBA.Z06	Layanan BMN	1.00	Layanan	480.000.000
Kegiatan	:	7097	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum			1.660.206.564.000
	:	1. 01	Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Umum yang diberikan			
	:	2. 01	Nilai Tingkat Pengawasan Kearsipan			
Klasifikasi Rincian Output 7	:	7097.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.633.709.822.000
Rincian Output	:	01 EBA.001	Layanan BMN Satker Eselon I Setjen	1.00	Layanan	2.937.616.000
	:	02 EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	1.093.500.000
	:	03 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	1.847.046.000
	:	04 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	1.627.780.724.000
	:	05 EBA.Z06	Layanan BMN	1.00	Layanan	50.936.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7509-0771-7876-8611

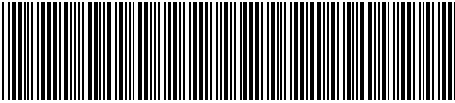
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

Klasifikasi Rincian Output	8	:	7097.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	236,00	Unit, m2, Paket	26.452.118.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	232.00	Unit	4.794.514.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	4.00	Unit	21.657.604.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	7097.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Layanan, Rekomendasi	44.624.000
Rincian Output		:	01	EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Layanan	44.624.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
I B. SUMBER DANA



DS:7509-0771-7876-8611

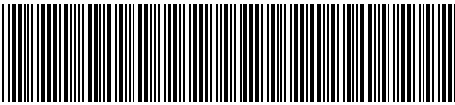
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.715.038.031.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.715.038.031.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



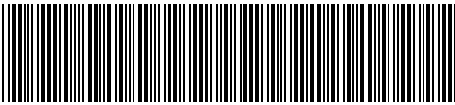
DS:7509-0771-7876-8611

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692003	SEKRETARIAT JENDERAL	1.548.160.517	140.425.396	26.452.118	-	-	1.715.038.031	01 . 51	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.548.160.517	140.425.396	26.452.118	-	-	1.715.038.031		
7092	Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama	-	9.592.640	-	-	-	9.592.640		
7092.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.592.640	-	-	-	9.592.640		
01	RM	-	9.592.640	-	-	-	9.592.640		
7093	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum	-	22.672.307	-	-	-	22.672.307		
7093.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	22.672.307	-	-	-	22.672.307		
01	RM	-	22.672.307	-	-	-	22.672.307		
7094	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum	-	5.119.557	-	-	-	5.119.557		
7094.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.119.557	-	-	-	5.119.557		
01	RM	-	5.119.557	-	-	-	5.119.557	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

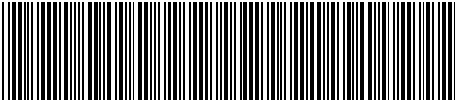


DS:7509-0771-7876-8611

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7095	Perencanaan dan Organisasi	-	12.340.526	-	-	-	12.340.526		
7095.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.007.221	-	-	-	5.007.221	01 . 51	
01 RM		-	5.007.221	-	-	-	5.007.221	139	
7095.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.333.305	-	-	-	7.333.305	01 . 51	
01 RM		-	7.333.305	-	-	-	7.333.305	139	
7096	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian	-	5.106.437	-	-	-	5.106.437		
7096.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.106.437	-	-	-	5.106.437	01 . 51	
01 RM		-	5.106.437	-	-	-	5.106.437	139	
7097	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum	1.548.160.517	85.593.929	26.452.118	-	-	1.660.206.564		
7097.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	1.548.160.517	85.549.305	-	-	-	1.633.709.822	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7509-0771-7876-8611

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		1.548.160.517	85.549.305	-	-	-	1.633.709.822	139	
7097.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	26.452.118	-	-	26.452.118	01 . 51	
01 RM		-	-	26.452.118	-	-	26.452.118	139	
7097.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	44.624	-	-	-	44.624	01 . 51	
01 RM		-	44.624	-	-	-	44.624	139	
JUMLAH		1.548.160.517	140.425.396	26.452.118	-	-	1.715.038.031		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

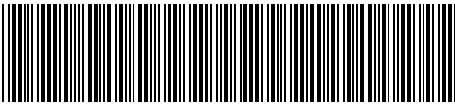
ttd.
NICO AFINTA

Kementrian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7509-0771-7876-8611

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

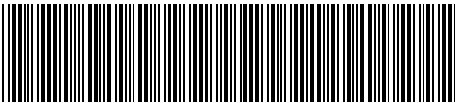
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		51 BELANJA PEGAWAI	129.013.356	129.013.356	129.013.356	129.013.356	129.013.356	129.013.356	129.013.356	129.013.356	129.013.356	129.013.356	129.013.356	129.013.601	1.548.160.517
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	7.132.661	7.132.661	7.132.661	7.132.661	7.132.661	7.132.661	7.132.661	7.132.661	7.132.661	7.132.661	7.132.661	7.134.658	85.593.929
		53 BELANJA MODAL	2.204.334	2.204.334	2.204.334	2.204.334	2.204.334	2.204.334	2.204.334	2.204.334	2.204.334	2.204.334	2.204.334	2.204.444	26.452.118
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.717.854	8.717.854
		- PNBP (425131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.717.854	8.717.854

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
IV A. B L O K I R



DS:7509-0771-7876-8611

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692003] SEKRETARIAT JENDERAL

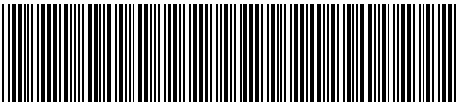
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2026
IV B. C A T A T A N



DS:7509-0771-7876-8611

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692003] SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692003	SEKRETARIAT JENDERAL		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7097	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum		
7097.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 21.657.604		
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	* Pembuatan Parkir Motor Gedung Sekretariat Jenderal (1.403 m2) Rp. 9.507.952		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Rehabilitasi Atap Gedung Sekretariat Jenderal (2.175 m2) Rp. 6.659.525		
	* Rehabilitasi Mekanikal Elektrikal Plumbing Gedung Kantor Sekretariat Jenderal (13.728 m2) Rp. 2.546.018		
	* Rehabilitasi Sarana Prasarana Rumah Negara Golongan I A Lebak Bulus Rp. (901 m2) 2.944.109		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA